

**KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMAHAMAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
DAN PERAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empris pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul)

MIFTAHUL JANNAH

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: jannahm926@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the effect of human resources competency, understanding of government accounting standard, internal control system and the role of supporting infrastructure on the quality of regency financial statements (empirical study at government institutions in gunung kidul regency DIY). There are 150 respondents in this resesearch. This research uses purposive sampling method. SPSS V15 is used to analyze hypotheses in this research.

Based on the result of this research are human resources competency influence positively on quality of regency financial statements. Understanding of government accounting standard influence positively, but not significant. Internal control system and the role supporting infrastructure influence positively on quality of regency financial statements.

Keywords: *Multiple Regression, Human Resources Competency, Understanding of Government Accounting Standard, Internal Control System, The Role of Supporting Infrastructure, Quality of Regency Financial Report.*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya perubahan masa dari orde baru ke era reformasi sangat memberikan dampak yang positif bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Adapun perubahan paradigma baru ini diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pemerintah harus melakukan berbagai upaya-upaya yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Nasruddin (2008), sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan sebuah instansi ataupun organisasi, disebabkan bahwa sumber daya manusia memiliki nilai peran yang sangat tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Kualitas SDM memegang peranan penting dalam sebuah organisasi oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan SDM dibidang akuntansi pemerintahan.

SAP merupakan salah satu acuan dalam menyusun laporan keuangan. SAP merupakan landasan dasar yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap SAP, maka akan dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang disusun sesuai SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal serta berguna dalam menentukan keputusan.

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu kegiatan/proses yang dilakukan sesuai dengan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh semua kalangan di instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 tahun 2008).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Adapun hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul empat tahun terakhir memperoleh opini WDP.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan berbagai upaya seperti membenahi Sistem Pengendalian Internal yang masih lemah, memperbaiki struktur maupun sistem penataan barang milik Negara/Daerah dengan tertib, serta memperbaiki ketentuan ketidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, memberikan pelatihan terhadap pegawai/staff yang memiliki kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Semua kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul tersebut dijadikan sebagai sebuah poin penting oleh Pemerintah Daerah yang harus diperbaiki agar dapat memperoleh opini audit WTP dari BPK RI.

Ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu pertama Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh entitas penyusun laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apakah Peran Sarana dan Prasarana pendukung dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

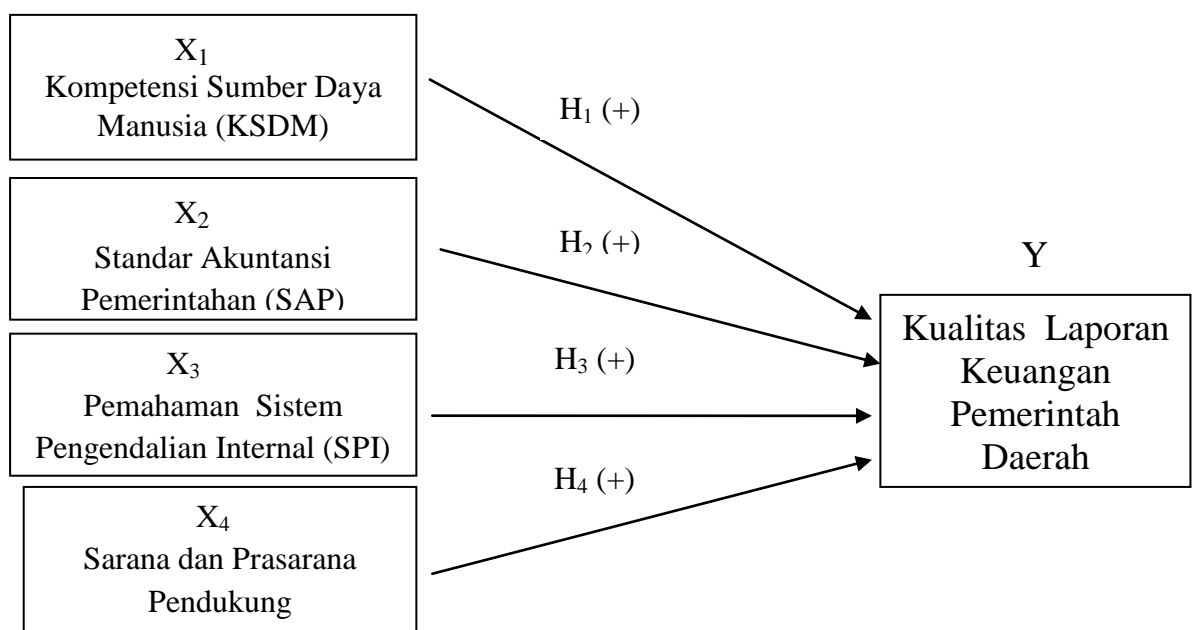
B. KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1) Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1

Kerangka Konseptual Penelitian



2) Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. (Haliah, 2012). Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

3) Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul, ulum 2004). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik terdiri dari 1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal). 2) Pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Mardiasmo (2002:20). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hubungan antar Penyelenggaraan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal tidak memperhatikan tanggung jawab vertikal saja. Tujuan yang berikutnya adalah perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Teori akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan memberi jawaban yang jelas kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam sebuah organisasi (Rasul, 2003).

Mardiasmo (2005:21) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Keterkaitan teori akuntabilitas dengan penelitian ini yaitu, dikarenakan bahwa pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memenuhi aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam memimpin, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

4) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian kompetensi dalam penjelasan pasal 3 PP No. 101 Tahun 2000 bahwa, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan jabatannya. Kemampuan sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam mencapai keberhasilan serta tujuan dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi sektor publik sangat ditekankan pada kemampuan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sehingga organisasi sektor publik memiliki reputasi kinerja yang unggul serta *akuntabel* dipandangan masyarakat.

Kompetensi sumber daya manusia yaitu menggambarkan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan pekerjaan atau peran secara efektif (Wirawan, 2009:9).

5) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAP menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sampai basis akrual.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (PP N0 24 Tahun 2005) adalah:

1. **Relevan**, yaitu informasi yang didalamnya memuat tentang informasi yang dapat memengaruhi kepuasan pengguna dan dapat membantu mereka dalam menemukan titik keluaranya, baik sebagai alat untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, atau masa kini, dan untuk memprediksi peristiwa yang akan terjadi dimasa depan.

Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- ✓ Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi yang dapat membantu untuk memprediksi masa depan, dengan melihat suatu peristiwa masa lalu dan mempertimbangkannya, serta berdasarkan kejadian masa kini.
 - ✓ Tepat Waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu yaitu sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan.
2. **Lengkap**, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dibutuhkan dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

3. **Andal**, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya dan tidak menimbulkan kesalahan material, menyajikan informasi secara benar dan jujur, serta dapat diverifikasi kesalahannya.
4. **Netralitas**, yaitu informasi yang dapat digunakan oleh siapapun serta bersifat umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.
5. **Dapat dibandingkan**, yaitu informasi yang dimuat dapat dibandingkan dengan periode yang lalu serta dapat dibandingkan dengan entitas lain yang bergerak dalam bidang yang sama.
6. **Dapat dipahami**, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh semua kalangan ataupun pihak pengguna laporan keuangan. Dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan.

6) Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu alat yang dapat digunakan sebagai tolak ukur atas kinerja pencapaian. Pengendalian intern tidak terbatas hanya pada rencana organisasi, namun juga prosedur dan catatan yang berkaitan dengan proses menentukan keputusan yang mengarah pada otorisasi pimpinan atas transaksi tertentu. Pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan efektivitas kegiatan operasi, serta merupakan pondasi *good governance* dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan (Sukmaningrum 2012).

7) Sarana Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung adalah suatu ukuran tentang tingkat pelayanan yang tersedia pada sarana yang memadai. Sangat, sulit rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan instansi dapat tercapai jika sarana prasarana tidak memadai. Pada Instansi pemerintah harus memperhatikan mengenai kebutuhan dan perlengkapan operasional karena hal tersebut merupakan alat penunjang keberhasilan suatu visi, misi dan sasaran dalam sebuah organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Teknologi informasi selain berfungsi sebagai (*hardware* dan *software*)

untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi.

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1) Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber Daya Manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Kapasitas SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap tanggung jawab yang diberikan, serta pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh lembaga instansi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Penelitian Rahmayati (2012) dan Choirunisah (2008) menemukan bukti bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Negara/lembaga. Kusuma (2014) menghasilkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengembangan hipotesisnya sebagai berikut.

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung Kidul.

2) Hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dan untuk memperoleh hasil pengukuran kinerja yang lebih baik dan memfasilitasi manajemen keuangan atau aset yang lebih transparan dan akuntabel, Penerapan SAP yang sudah sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penerapan SAP diyakini memiliki dampak yang baik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riani Nurhayati (2013) menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemahaman terhadap SAP memang sangat penting, dikarenakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka, pemahaman SAP harus benar-benar dikuasai dan dipahami serta dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hipotesisnya sebagai berikut:

H₂: Pemahaman Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung Kidul.

3) Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian Irine Chintya (2015) tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah di kota solok (studi pada SKPD kota Solok). Hasil penelitian Irine menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di kota Solok.

Sukmaningrum (2012), Fadhila (2013) dan Lubis (2014) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas peneliti menggunakan kembali variabel Sistem Pengendalian Internal kedalam penelitian dikarenakan perbedaan lokasi geografis dari penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara penerapan SPI pada kualitas LKPD sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₃: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul

4) Hubungan antara Sarana Prasarana Pendukung dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu manfaat utama dari penggunaan teknologi informasi dalam organisasi yaitu pekerjaan dapat terselesaikan lebih cepat. Divisi-divisi dalam organisasi diharapkan dapat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan mempercepat proses pertukaran atau arus informasi antar divisi sehingga hasil kinerja menjadi lebih bagus. Berkaitan dengan aspek pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi diharapkan dapat membantu.

Maka disini peneliti menggolongkan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam sarana prasarana pendukung, karena lebih luas pembahasannya jika pemanfaatan Teknologi Informasi digolongkan menjadi sarana prasarana pendukung. Adapun sarana prasarana pendukung disini yang tergolong

diantaranya yaitu, pemanfaatan komputer, printer, serta pemanfaatan internet untuk memudahkan aktivitas terkait dengan *Software* maupun *Hardware* untuk kualitas laporan keuangan yang baik, serta memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kebutuhan instansi pemerintah, yang berkaitan dengan Teknologi Informasi.

Nurillah As Syifa (2014) melakukan penelitian untuk menentukan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh Celviana Winidyaningrum (2010), Kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan penjelasan di atas yaitu:

H₄: Pemanfaatan Sarana Prasarana Pendukung Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul

Dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis adanya pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pegawai penyusun laporan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 2) untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 3) untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 4) untuk menganalisis adanya pengaruh sarana dan prasarana pendukung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 5) untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris adanya pengaruh dari semua variabel independen yang dipilih terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1) Obyek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

2) Jenis Data

Umar (2005), menyatakan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer.

3) Jenis Data

Umar (2005), menyatakan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer.

4) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden atau pengguna laporan keuangan terkait permasalahan yang akan diteliti di instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

5) Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional yaitu aspek penelitian yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengukur variabel. Variabel Penelitian merupakan sesuatu hal yang memang memiliki sifat dan mempunyai variasi tertentu, yang sengaja dibuat untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1994). Penelitian ini menggunakan dua macam variabel penelitian yaitu, variabel bebas dan variabel terikat.

a) Variabel Dependen

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b) Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peran Sarana Prasarana Pendukung.

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber daya manusia merupakan komponen yang penting dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar penyusunan serta batas waktu yang telah ditentukan. Laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kompetensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

2) Pengaruh Pemahaman Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemahaman Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, Peneliti jadikan sebagai variabel bebas karena merupakan salah satu komponen yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pelaporan. Pemahaman terhadap SAP merupakan faktor-faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan serta merupakan pemahaman dasar yang harus benar-benar dipahami.

3) Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal peneliti jadikan sebagai variabel independen karena merupakan salah satu bentuk alat kontrol yang dapat dilakukan pada internal sebuah organisasi, untuk menilai sejauh mana kinerja

yang telah dihasilkan. Peranan pengendalian internal ini sangat dibutuhkan untuk mengukur apakah pemerintahan sudah berjalan secara efisiensi, efektif serta ekonomis, hal ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat serta dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah daerah.

4) Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana Pendukung peneliti jadikan sebagai variabel independen karena sarana yang digunakan untuk kegiatan pelaporan keuangan sangat mendukung dan membantu kualitas laporan yang dihasilkan. Sarana prasarana membahas tentang teknologi informasi yang dapat mendukung kegiatan pelaporan. Dengan adanya alat teknologi seperti komputer, printer dll dapat memudahkan pekerjaan dalam penginputan data, proses, serta output yang dihasilkan lebih terpercaya jika dalam pemrosesannya sudah berjalan sesuai dengan prosedur.

F. HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik statistik yang bertujuan memerikan penjelasan atau informasi mengenai karakteristik dari suatu kelompok data atau lebih sehingga pemahan akan ciri-ciri yang khusus dari kelompok data tersebut diketahui. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang pengukurannya mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum (Ghozali, 2011).

Tabel 4.5.
Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSDM	120	38	90	68,24	9,206
PSAP	120	9	45	29,95	8,154
SPI	120	21	45	35,68	4,371
SPP	120	21	40	32,04	3,948
KLKPD	120	48	80	63,71	7,396
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

2) Uji Kualitas Instrumen

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kevalidan suatu pertanyaan dari penyebaran kuesioner. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Sebuah data dapat dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel, maka point pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.

Tabel 4.6.
Hasil Uji Validitas Variabel KSDM

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Keterangan
KSDM	KSDM 1	0,582	0,50	Valid
	KSDM 2	0,606	0,50	Valid
	KSDM 3	0,694	0,50	Valid
	KSDM 4	0,697	0,50	Valid
	KSDM 5	0,681	0,50	Valid
	KSDM 6	0,597	0,50	Valid
	KSDM 7	0,685	0,50	Valid
	KSDM 8	0,714	0,50	Valid
	KSDM 9	0,797	0,50	Valid
	KSDM 10	0,719	0,50	Valid
	KSDM 11	0,673	0,50	Valid
	KSDM 12	0,740	0,50	Valid
	KSDM 13	0,635	0,50	Valid
	KSDM 14	0,644	0,50	Valid
	KSDM 15	0,640	0,50	Valid
	KSDM 16	0,509	0,50	Valid
	KSDM 17	0,506	0,50	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Tabel 4.7.
Hasil Uji Validitas Variabel PSAP

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Keterangan
PSAP	PSAP 1	0,889	0,50	Valid
	PSAP 2	0,909	0,50	Valid
	PSAP 3	0,928	0,50	Valid
	PSAP 4	0,928	0,50	Valid
	PSAP 5	0,859	0,50	Valid
	PSAP 6	0,873	0,50	Valid
	PSAP 7	0,891	0,50	Valid
	PSAP 8	0,866	0,50	Valid
	PSAP 9	0,824	0,50	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Tabel 4.8.
Hasil Uji Validitas Variabel SPI

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Keterangan
SPI	SPI 1	0,766	0,50	Valid
	SPI 2	0,754	0,50	Valid
	SPI 3	0,688	0,50	Valid
	SPI 4	0,698	0,50	Valid
	SPI 5	0,694	0,50	Valid
	SPI 6	0,671	0,50	Valid
	SPI 7	0,650	0,50	Valid
	SPI 8	0,604	0,50	Valid
	SPI 9	0,568	0,50	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Tabel 4.9.
Hasil Uji Validitas Variabel SPP

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Keterangan
SPP	SPP 1	0,647	0,50	Valid
	SPP 2	0,703	0,50	Valid
	SPP 3	0,762	0,50	Valid
	SPP 4	0,572	0,50	Valid
	SPP 5	0,543	0,50	Valid
	SPP 6	0,697	0,50	Valid
	SPP 7	0,668	0,50	Valid
	SPP 8	0,572	0,50	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Tabel 4.10.
Hasil Uji Validitas Variabel KLKPD

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Keterangan
KLKPD	KLKPD 1	0,678	0,50	Valid
	KLKPD 2	0,759	0,50	Valid
	KLKPD 3	0,745	0,50	Valid
	KLKPD 4	0,696	0,50	Valid
	KLKPD 5	0,648	0,50	Valid
	KLKPD 6	0,649	0,50	Valid
	KLKPD7	0,664	0,50	Valid
	KLKPD 8	0,743	0,50	Valid
	KLKPD 9	0,675	0,50	Valid
	KLKPD 10	0,642	0,50	Valid
	KLKPD 11	0,739	0,50	Valid
	KLKPD 12	0,672	0,50	Valid
KLKPD	KLKPD 14	0,688	0,50	Valid
	KLKPD15	0,567	0,50	Valid
	KLKPD 16	0,637	0,50	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel uji validitas menunjukkan bahwa poin-poin pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner mempunyai r hitung $>$ r tabel (0,50), dengan demikian seluruh item pertanyaan dalam kuesioner yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, sarana prasarana pendukung dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan valid.

b) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berubah atau konsisten terhadap instrument penelitian. Jika nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,60 maka instrument penelitian dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.11.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
KSDM	0,917	0,60	Reliabel
SAP	0,965	0,60	Reliabel
SPI	0,853	0,60	Reliabel
SPP	0,799	0,60	Reliabel
KLKPD	0,912	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena rata-rata nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

c) Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis jalur, salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan *one sample kolmogrov smirnov test*, yang mana jika nilai *asymp.sig (2-tailed)* > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.

**Hasil Uji Normalitas
Tabel 4.12.**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	4,74873528
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,055
	Negative	-,086
Kolmogorov-Smirnov Z		,940
Asymp. Sig. (2-tailed)		,340

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Berdasarkan hasil pengujian, maka semua komponen kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, sarana prasarana pendukung dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdistribusi normal karena nilai *asyimp sig (2-tailed)* > dari 0,05 yaitu sejumlah 0,340.

2) Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.13.
Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
KSDM	0,618	1,619	Bebas Multikolinearitas
PSAP	0,702	1,425	Bebas Multikolinearitas
SPI	0,557	1,796	Bebas Multikolinearitas
SPP	0,536	1,866	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.13. menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel independen nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dari masing masing variabel independen kurang dari 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan tingkat signifikan $\alpha=5\%$. Model regresi dapat dikatakan Heteroskedastisitas jika nilai sig lebih besar dari 5%.

Tabel 4.14.
Hasil Uji Heteroskedstisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,974	2,775		2,153	,033
	KSDM	,005	,040	,016	,137	,891
	PSAP	-,006	,042	-,016	-,143	,887
	SPI	-,107	,088	-,152	-1,224	,223
	SPP	,039	,099	,050	,396	,693

a. Dependent Variable: ARS Resid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Dari semua variabel ini tidak terdapat heteroskedastisitas, dimana jumlah sig untuk variabel KSDM sebesar 0,891, untuk variabel PSAP sebesar 0,887, untuk variabel SPI sejumlah 0,223, dan untuk variabel SPP nilai sig sejumlah 0,693.

d) Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1) Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 4.15.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,766 ^a	,587	,572	4,831	2,015

a. Predictors: (Constant). SPP. PSAP. KSDM, SPI

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.15. yaitu diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,572 hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan model variasi variabel terikat sebesar 57,2%. Sedangkan 42,8% dijelaskan oleh variabel lainnya.

2) Uji Signifikansi Simultan (Statistik F)

Tabel 4.16.
Hasil Uji Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3807,692	4	951,923	40,794	,000 ^a
	Residual	2683,508	115	23,335		
	Total	6491,200	119			

a. Predictors: (Constant), SPP, PSAP, KSDM, SPI

b. Dependent Variable: KLKPD

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16. dapat dilihat hasil pengujian nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel ($40,794 > 2,43$) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05.

Diketahui nilai sigifikan sebesar 0,000. Karena nilai sigifikan $< 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan sarana prasarana pendukung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3) Uji Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 4.17.
Hasil Uji Simultan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,310	4,297		2,399	,018		
	KSDM	,187	,061	,233	3,059	,003	,618	1,619
	PSAP	,071	,065	,078	1,089	,278	,702	1,425
	SPI	,689	,136	,408	5,074	,000	,557	1,796
	SPP	,434	,153	,232	2,836	,005	,536	1,866

a. Dependent Variable: KLKPD

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.17. variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai sig sebesar 0,003, pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai sig sebesar 0,278, sistem pengendalian internal memiliki nilai sig sebesar 0,000 dan sarana prasarana sebesar 0,005.

Kesimpulannya bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Sarana Prasarana Pendukung memenuhi ketentuan, sedangkan variabel independen PSAP tidak memenuhi ketentuan syarat karena nilai sig $0,278 > 0,005$.

e) Persamaan Regresi Berganda

Tabel 4.18.
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koef.B	T	Sig	Keterangan
Konstanta	10,310	2,399	0,18	
KSDM	0,187	3,059	0,003	Diterima
PSAP	0,071	1,089	0,278	Ditolak
SPI	0,689	5,074	0,000	Diterima
SPP	0,434	2,836	0,005	Diterima
Adj. R Square	0,572			
F statistic	40,794			
Sig F	0,000			

Dependen variabel : KLKPD

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

$$KLKPD = 10,310 + 0,187 KSDM + 0,071 PSAP + 0,689 SPI + 0,434 SPP +$$

e

1) Hasil Pengujian H_1

Hasil pengujian H_1 pada tabel 4.18. menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,187, nilai t sebesar 3,059 dengan nilai sig $(0,003) < \alpha$ (0,05). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai sig menunjukkan hasil yang signifikan dan koefisien regresi menunjukkan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya H_1 diterima.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang baik dipengaruhi oleh kompetensi SDM yang baik pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2014) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber

Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Hasil Pengujian H₂

Hasil pengujian H₂ pada tabel 4.18. menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,071, nilai t sebesar 1,089 dengan nilai sig (0,278) > α (0,05). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai sig menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan koefisien regresi menunjukkan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya H₂ ditolak.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Adapun penelitian yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya hipotesis ini ditolak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, individu penyusun laporan keuangan di instansi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul memiliki pemahaman yang kurang terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengenalan PSAP secara keseluruhan, pemahaman terhadap PSAP hanya sebatas pelaporan keuangan yang sering terjadi terkait dengan perolehan dana, pengelolaan dana, serta pengeluaran dana saja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kusumah (2012) mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitiannya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

3) Hasil Pengujian H₃

Hasil pengujian H₃ pada tabel 4.18. menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,689, nilai t sebesar 5,074 dengan nilai sig (0,000) < α (0,05). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai sig menunjukkan hasil yang signifikan dan koefisien regresi menunjukkan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya H₃ diterima.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang baik dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang baik pula.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sukmaningrum (2012) membuktikan secara empiris bahwa Pengendalian Internal Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4) Hasil Pengujian H₄

Hasil pengujian H₄ pada tabel 4.18. menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,434 , nilai t sebesar 2,836 dengan nilai sig (0,005) < α (0,05). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai sig menunjukkan hasil yang signifikan dan koefisien regresi menunjukkan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana pendukung berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya H₄ diterima.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa sarana prasarana pendukung berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sarana prasarana pendukung yang memadai dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang baik dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung yang memadai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Primayana *et al*, (2014) menunjukkan terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan laporan keuangan.

G. SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, serta peran Sarana Prasarana Pendukung terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan, pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan, sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan dan sarana prasarana pendukung berpengaruh positif signifikan. Selain itu, dengan adanya hasil penelitian yang dipaparkan diatas, adapun hal-hal yang dapat mendukung perolehan opini WTP Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2016 yaitu diantaranya memperhatikan penyajian dan pengelolaan aset tetap, melakukan perbaikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), serta memperbaiki pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar semakin baik kedepannya.

H. SARAN

Adapun saran yang diusulkan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- 1) Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait Akuntansi Sektor Pemerintahan.
- 2) Bagi SKPD diharapkan meningkatkan kinerja keuangannya dengan cara memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh semua kalangan pihak/masyarakat secara transparansi dan akuntabilitas sehingga kinerja pemerintah dapat diukur.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian yang akan datang dibidang Akuntansi Sektor Pemerintahan, dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh dan belum dimasukkan dalam penelitian ini, serta dengan menambah jumlah sampel dan mempertimbangkan proporsi sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- As, Syifa, Nurillah, 2014, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok), *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1,No.1.Hal: 2337-3806.
- Chintya, Irine (2015), “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok (Studi Pada SKPD Kota Solok)”, Universitas Negeri Padang, artikel.
- Choirunisa F., Rahmayati 2012, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi”, *Jurnal Universitas Gadjah Mada*. 1(3). h: 79-92.
- Donaldson, L., Davis, J, H, 1991, Stewardship Theory Or Agency Theory, CEO Governance And Shareholder Returns, *Australian Journal Of Management*, 16, PP 49-46.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haliah, 2012, “*Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*”, Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar.
- Kusuma, I, 2014, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Akuntansi*, Vol 3. No.1.
- Mardiasmo, 2005 *Akuntansi Sektor Publik, Edisi pertama*, Yogyakarta: penerbit Andi.
- Nasruddin, (2008), ”Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)*.

Nurhayati, Riani, (2013), “pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Siliwangi Tasikmalaya*.

Nurlaila, 2014,” Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan”.

Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui <http://www.google.com> [10/03/2013].

Primayana, *et al.*, 2014, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah(Studi Pada Pemerintahan Daerah kabupaten Buleleng)”,*Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi , Vol 2 No:1*.

Sugiyono , 2010, *Metode Penelitian Bisnis*: Alfabeta, Bandung.

Sukmaningrum., Fadhila, Lubis (2012: 41), “Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *jurnal ISSN : 1693-4482. STIE STEMBI*.

Sukmaningrum., Fadhila, Lubis (2012: 41), “Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *jurnal ISSN : 1693-4482. STIE STEMBI*.

Ulum, Ihyaul, MD., 2004, *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.”

Umar, Husein, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winidyaningrum, Celviana, 2010, “Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi”, *Jurnal SNA X11, Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Wirawan, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia